

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan disajikan kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, serta saran yang diberikan terhadap sistem pengendalian internal terhadap piutang usaha pada LPP TVRI Provinsi Sumatera Barat.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa terhadap sistem pengendalian internal terhadap piutang usaha pada LPP TVRI Provinsi Sumatera Barat, maka dapat disimpulkan:

1. LPP TVRI Sumatera Barat menerapkan strategi bisnis dengan memberikan fasilitas pembayaran secara kredit kepada mitra kerja sama guna meningkatkan pendapatan dan menjaga keberlangsungan operasional. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan konsekuensi berupa timbulnya piutang yang perlu dikelola secara profesional. Proses pengelolaan piutang dilakukan secara sistematis, mulai dari pencatatan berdasarkan prinsip akuntansi akrual, penerbitan dokumen pendukung, hingga penagihan dan pemantauan secara berkala. Piutang yang tidak tertagih dapat dicadangkan atau dihapus, dengan prosedur yang mengacu pada ketentuan akuntansi pemerintah dan harus melalui verifikasi dari BPK. Meski piutang dihapus secara administrasi, hak penagihan tetap dipertahankan jika debitur menunjukkan itikad baik.

2. Sistem pengendalian piutang usaha di LPP TVRI Sumatera Barat telah berjalan dengan dasar struktur yang cukup baik dan mengacu pada standar pengendalian internal internasional. Namun, terdapat ruang perbaikan, terutama dalam aspek penilaian risiko dan efisiensi operasional penagihan. Penguatan terhadap sistem kredit, optimalisasi sarana penunjang penagihan, dan peningkatan kapasitas SDM akan menjadi kunci dalam memastikan keberhasilan sistem pengendalian piutang secara menyeluruh, guna mendukung tujuan jangka panjang lembaga sebagai penyiaran publik yang mandiri.
3. Untuk meningkatkan efektivitas pengendalian internal terhadap piutang usaha, LPP TVRI Sumatera Barat perlu menerapkan serangkaian langkah yang terstruktur dan sistematis. Pengendalian ini sangat penting untuk memastikan bahwa pendapatan dari jasa siaran, iklan, sponsorship, serta kerja sama lainnya dapat dicatat secara akurat dan ditagih tepat waktu, mengingat status TVRI sebagai lembaga penyiaran publik yang mengelola dana negara. Beberapa solusi utama yang disarankan meliputi: penerapan kebijakan dan prosedur piutang usaha yang jelas melalui kontrak tertulis dan analisis kelayakan kredit; penggunaan sistem pencatatan keuangan berbasis teknologi untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi pencatatan; serta pelaksanaan penagihan yang terstruktur dan terjadwal guna mencegah terjadinya piutang macet. Selain itu, TVRI juga perlu menyusun laporan umur piutang secara rutin agar dapat memantau kesehatan keuangan dan

menindaklanjuti piutang bermasalah secara cepat. Pemisahan tugas antara fungsi pemasaran, pencatatan, dan penagihan juga harus diterapkan untuk menghindari potensi kecurangan. Pengawasan internal melalui audit berkala sangat penting untuk memastikan integritas data piutang. Terakhir, penanganan piutang bermasalah dilakukan melalui penagihan intensif dan, jika perlu, penghapusan piutang dengan persetujuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan sebelumnya, terdapat beberapa permasalahan yang perlu diperbaiki oleh Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) Provinsi Sumatera Barat, yaitu:

1. Untuk meminimalkan risiko kerugian akibat piutang yang tidak tertagih, LPP TVRI Sumatera Barat disarankan untuk menerapkan sistem pembayaran secara bertahap dalam tiga termin, yaitu: termin pertama sebesar 30%, termin kedua sebesar 30%, dan termin ketiga sebesar 40%.
2. LPP TVRI Sumatera Barat perlu melakukan pengecekan secara rutin antara catatan akuntansi dan bukti fisik seperti media order dan bukti penagihan. Dengan melibatkan tim audit internal, langkah ini bertujuan untuk memastikan keakuratan data piutang, mencegah terjadinya penyimpangan, serta meningkatkan transparansi dalam pencatatan dan pengelolaan piutang usaha.